

Penyandang Cacat dan Permasalahannya

Juang Sunanto

Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Pendidikan Indonesia

Pandangan dan Sikap Masyarakat

Keberadaan penyandang cacat (penca) telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini. Sejak kebudayaan manusia masih primitif sampai kebudayaan yang modern tak pernah masyarakat di dunia ini bebas dari keberadaan penca. Tampaknya tak ada korelasi antara kemajuan budaya, pengetahuan dan teknologi dengan kelahiran penca. Prosentase penca di negara yang dikatakan maju dan negara yang kurang maju atau bahkan ketinggalan hampir sama atau relatif tetap. Perbedaan jumlah karena disebabkan banyaknya jumlah penduduk. Kita tidak tahu secara pasti mengapa dunia ini tak pernah bebas dari penca. Kenyataan semacam ini tampaknya hanya Tuhanlah yang tahu dan inilah barangkali merupakan kehendakNya yang belum diketahui manusia. Keberadaan penca tidak akan pernah kita pungkiri meskipun tak seorangpun menghendaknya.

Sekalipun keberadaan penca tak pernah berubah, dalam arti selalu ada, namun kalau kita mencoba melihat bagaimana masyarakat dunia ini menyikapinya telah berubah sesuai dengan zamannya. Suatu zaman tertentu keberadaan penyandang cacat pernah dianggap sebagai kutukan atau terkait dengan dosa, sehingga dapat membawa aib bagi keluarganya. Pada saat tertentu pula, kehadiran penyandang cacat juga dianggap sebagai malapetaka.

Pada mulanya manusia sering kali mengkaitkan antara kecacatan dengan dosa, sehingga terjadinya kecacatan dapat membawa aib bagi keluarga atau penyandangnyanya sendiri. Dalam perkembangan berikutnya, orang memandang penyandang cacat sebagai individu yang harus dikasihani. Penyantunan terhadap penyandang cacat sering dihubungkan dengan ajaran kasih (baca belas kasihan/charity). Banyak kelompok-kelompok atau kaum pilantropis memberikan santunan kepada orang-orang cacat. Bentuk santunannya bervariasi dari yang hanya merawat sampai memberikan keterampilan kerja tertentu.

Penyantunan dengan dasar belas kasihan/charity dapat dianggap tidak sama dengan atas dasar kasih. Rasa belas kasihan didalamnya terkandung pandangan bahwa penyandang cacat ialah orang yang tidak berdaya karenanya perlu pertolongan dan tergantung pada orang lain.

Secara garis besar sikap dan pandangan masyarakat terhadap penca dapat dikategorikan dalam (1) tidak berguna/tidak diperlukan, (2) dikasihani/disantuni, (3) dilatih/dididik, (4) persamaan hak. Dengan sudut pandang yang lain cara pandang masyarakat terhadap penca dapat dikategorikan (1) penolakan, (2) penerimaan, (3) pemahaman, (4) pengetahuan.

Penca dalam Alkitab

Dalam Alkitab dapat kita temukan beberapa kisah tentang penyandang cacat. Misalnya, Yesus pernah di datangi oleh seorang lumpuh yang diusung oleh beberapa orang kemudian Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan berkata “Hai saudara, dosamu sudah diampuni” (Luk 5: 17-26, Mat 9:1-8, Mark 2: 1-12). Dalam kisah lain, Yesus menyembuhkan seorang pengemis buta, katanya “Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau” (Luk 18: 35 – 43, Mat 20:12 – 34, Mark 10:46-52). Kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman pelayanan Yesus di dunia ini, kecacatan sering dikaitkan dengan dosa dan iman.

Di samping kisah tersebut, pada suatu saat Yesus bertemu dengan orang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-muridNya bertanya ”Rabi siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuannya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus” bukan dia dan bukan juga orang tuannya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.”(Yoh 9: 1-3). Dalam kisah ini kita bisa tahu bahwa kecacatan juga dapat terjadi pada seseorang karena memang kehendak Tuhan.

Model Individual dan Sosial

Ada dua model cara memandang terhadap penca yaitu *individual model* dan *social model*. Kedua model ini menunjukkan perbedaan yang prinsip dimana individual model memandang bahwa kecacatan atau orang yang cacat itu dianggap masalah dengan kata lain orang cacat itulah yang menimbulkan masalah. Sebaliknya sosial model menganggap bahwa penca itu sendiri bukan problem tetapi problemnya terletak pada sikap masyarakatlah yang menimbulkan masalah.

Dalam individual model digambarkan bahwa penca menjadi problem karena mereka dianggap membawa rasa malu keluarga, selalu memerlukan bantuan (tergantung) pada orang lain, orang yang menderita, memerlukan rehabilitasi dll. Dalam sosial model menganggap problem muncul akibat sikap masyarakat yang negatif terhadap penyandang cacat.

Konvensi dan UU tentang Penca

Perhatian masyarakat dunia terhadap penca hingga sekarang sudah cukup baik dengan ditandai munculnya beberapa konvensi yang terkait dengan persoalan penca. Beberapa konvensi tersebut diantaranya adalah (1) Deklarsi HaklAsasi manusia, tahun 1948, (2) Konvensi HakAnak, tahun 1989, (3) Konvensi Dunian tentang Education for All, tahun 1990, (4) Peraturan Standart tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat, tahun 1993, (5) Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, tahun 1994. Secara khusus perhatian masyarakat Indonesia terhadap penca terwujud dengan lahirnya UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Prinsip dan Filosofi Inklusi

Prinsip dan filosofi masyarakat inklusif pada dasarnya menganggap bahwa anggota masyarakat keadaanya beragam ditinjau dari berbagai aspek diantaranya kaya miskin, cacat tidak cacat, jenis pekerjaan atau profesi, status pendidikan dan lain-lain. Keadaan yang beragam ini harus menjadi satu kesatuan atau dengan kata lain bersatu dalam keberagaman.

Prinsip kooperatif lebih diutamakan daripada kompetitif dalam masyarakat inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu atau kelompok tertentu sebaiknya memiliki prestasi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya tanpa harus dibandingkan dengan prestasi atau kemampuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini menggambarkan bahwa setiap individu atau kelompok mempunyai fungsi dan peranan masing-masing yang sama pentingnya.

Masyarakat inklusif menghargai setiap hak individu. Meskipun dalam pelaksanaannya selalu dalam konteks kebersamaan. Untuk dapat melakukan hal ini fleksibilitas menjadi kata kunci yang penting.

Dalam kehidupan masyarakat kristiani tiga hal ini telah terangkum dalam kehidupan bergereja dimana gereja merupakan persekutuan individu-individu kristen yang beragam dalam hal suku bangsa, bahasa, pendidikan, status ekonomi dan sosial, cacat-normal, dan lain-lain yang dipersatukan dalam Yesus Kristus.

Meskipun demikian, hingga sekarang prinsip dan filosofi masyarakat inklusif masih perlu dikembangkan khususnya jika dihubungkan dengan perilaku atau sikap umat kristiani terhadap penyandang cacat baik dalam kegiatan bergereja maupun dalam kegiatan pelayanan di luar gereja.

Layanan Pendidikan

Sejarah perkembangan pendidikan bagi penyandang cacat di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Berdirinya *Blinden Instituut* tahun 1901 di Bandung yang diprakarsai oleh dr. Westhoff merupakan awal pelayanan terhadap penyandang cacat dimana para tunanetra diberikan latihan dengan program *shetered workshop* (bengkel kerja). Program inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya sekolah khusus bagi tunanetra di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1927, juga di Bandung, dibuka sekolah khusus bagi anak tunagrahita yang didirikan oleh *Bijzonder Onderwijs* yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Folker, sehingga sekolah ini disebut Folker School. Pada tahun 1930 sekolah khusus untuk tunarungu wicara juga dibuka di Bandung oleh seorang Belanda yang bernama C. M. Roelsema.

Pada masa kemerdekaan, keberadaan sekolah bagi penyandang cacat makin terjamin dengan adanya UUD 45 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di samping itu UU Pendidikan No 12 tahun 1954 memuat ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa. Mulai saat itulah sekolah bagi penyandang cacat disebut Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sejak tahun 1901 hingga sekitar tahun 1970an pendidikan bagi penyandang cacat masih terfokus pada layanan pendidikan yang segregatif (terpisah) dimana penyandang cacat dididik atau bersekolah di lembaga yang terpisah dari lembaga pendidikan atau sekolah pada umumnya. Sehubungan dengan paradigma dan konsep baru pendidikan luar biasa sistem pendidikan semacam itu dianggap tidak manusiawi lagi. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari penyandang cacat pun harus hidup di lingkungan pada umumnya (normal) sehingga memisahkannya sejak kecil di lingkungan sekolah yang khusus dapat menghambat proses sosialisasi paska sekolah.

Sejak tahun 1970an Indonesia telah memperkenalkan sistem layanan pendidikan (sekolah) dimana penyandang cacat bersekolah bersama sama dengan anak pada umumnya sekolah reguler yang disebut dengan sekolah terpadu (integrasi). Sistem sekolah terpadu ini sebagian besar melayani anak tunanetra sementara anak dengan kecacatan lain belum banyak mengikuti sistem sekolah terpadu ini.

Dalam perkembangan selanjutnya Indonesia juga memperkenalkan layanan pendidikan yang didasari oleh filosofi inklusi yang diamanatkan oleh PBB melalui prinsip *Education for All* (pendidikan untuk semua). Sayangnya filosofi pendidikan inklusif ini telah dipraktekkan secara terburu-buru di Indonesia sehingga hasilnya kurang memuaskan dan sering disalah artikan oleh para pelaku pendidikan di lapangan maupun di tataran birokratnya. Salah satu kasus yang paling populer akibat sosialisasi yang keliru ada sekolah memindahkan penyandang cacat dari SLB ke sekolah tersebut dengan tujuan agar sekolahnya menjadi inklusi.

Daftar Pustaka

- Aefsky, F. (1995). *Inclusion Confusion. A Guide to Educating Students with Exceptional Needs*. California: Corwin Press.
- Alcott, M. (2002) *An Intruduction to Children with Special Educational Needs*. London: Hodder & Stoughton.
- Armstrong, F., Amstrong, D., and Boorton, L. (2000) *Inclusive Education. Policy, Contexts, and Comparative Perspectives*. London: David Fulton.
- Foreman, P. (2001) *Integration and Inclusion in Action*. Victori: Nelson Thomson Learning.
- Johnsen, B. H. and Skjorten, M.D. (eds). (2001). *Education-Special Needs education: An Introduction*. Oslo: Unipub forlag.
- Norwich, B. (1996). *Special Needs Education or Education for all: connective specialization and ideological impurity*. *British Journal of Special Education*, 23, 3, 100-104
- Smith, J. D. (1998) *Inclusion School for All Students*. New York: Wadsworth.
- UNESCO. *Open File on Inclusive Education. Support Materials for Managers and Administrators*.

